



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2008-2009
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirut PT. Jamsostek (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 9 Februari 2009
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membicarakan hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas PT. Jamsostek (Persero); 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Hasanudin Said, Ak/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Anggota yg hadir	: orang anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI, ijin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) dibuka pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

Paparan Dirut PT. Jamsostek (Persero) tentang jawaban/tanggapan pertanyaan tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI.
(seperti diuraikan dalam buku)

III. USUL/MASUKAN ANGGOTA

1. Terkait adanya isu akan terjadi gelombang PHK pada tahun 2009, bagaimana antisipasi yang telah dan akan dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero). Berapa persen prediksi PT. Jamsostek terkait jumlah perusahaan yang telah/akan memutuskan hubungan dengan PT. Jamsostek (Persero).

2. Apakah investasi saham yang murah menguntungkan Jamsostek, mengingat iklim investasi nasional yang tidak pasti.
3. Banyak Serikat Pekerja yang tidak mengetahui program-program PT. Jamsostek. Bagaimana strategi yang dipakai oleh PT. Jamsostek (Persero) agar sosialisasi untuk lapisan bawah dapat tercapai.
4. Kapan realisasi program pelatihan untuk tenaga kerja yang terkena PHK dilaksanakan. Berapa lama pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja/pelatihan kewirausahaan dan apa saja persyaratannya. Persyaratan tersebut diharapkan tidak mempersulit para pekerja/calon tenaga kerja.
5. Mendukung kebijakan program meningkatkan kualitas internal di lingkungan Jamsostek, termasuk dalam melakukan koordinasi dengan Depnakertrans, agar para pekerja dapat berperan aktif dalam hal keanggotaan di Jamsostek. Perlu penjelasan PT. Jamsostek tentang adanya kenaikan jaminan kematian dan jaminan lainnya.
6. Berapa target penambahan kepesertaan Jamsostek di tahun 2009 dan berapakah besaran yang telah dicapai pada tahun 2008 yang lalu.
7. Apakah bantuan PT. Jamsostek untuk BLK-BLK sudah dikoordinasikan dengan Depnakertrans dan Pemda-pemda setempat. Apakah peran PT. Jamsostek dalam pelatihan ini, termasuk dalam hal pelatihan alih profesi.
8. Apa yang menjadi pertimbangan PT. Jamsostek dalam membatasi penempatan saham di bank pemerintah/swasta. Apa saja masalah dan kendala yang dihadapi PT. Jamsostek sehingga belum ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani asuransi TKI.
9. Apakah tenaga kerja yang telah di PHK telah mendapatkan bantuan dari Jamsostek senilai Rp. 350.000,- per orang. Apa saja upaya PT. Jamsostek agar tenaga kerja dapat mengikuti program kepesertaan Jamsostek, mengingat banyak penghasilan tenaga kerja kita masih dibawah Rp. 1 juta.
10. Perlu pemikiran agar diadakan "Dana Abadi" untuk para tenaga kerja, sehingga dana abadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat program yang dapat membantu ketrampilan TKI. Apakah Program Bina Lingkungan, yaitu pengadaan fasilitas tempat tinggal kepada para pengemudi dapat dilaksanakan oleh PT. Jamsostek.

IV. KESIMPULAN

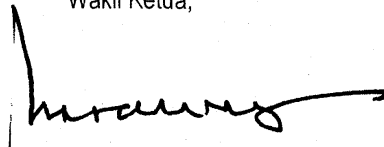
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirut PT. Jamsostek (Persero) pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI meminta PT Jamsostek (Persero) untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan akibat krisis ekonomi global dengan melaksanakan program penanggulangan JHT dan pelatihan terhadap pekerja serta melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
2. Komisi IX DPR RI mendukung PT Jamsostek (Persero) untuk terus meningkatkan pencapaian hasil investasi dengan melakukan investasi yang lebih selektif dan meminta agar hasil investasi tersebut benar-benar digunakan untuk peningkatan kesejahteraan peserta PT Jamsostek beserta keluarganya.

3. Komisi IX DPR RI mendesak PT Jamsostek (Persero) agar melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Depnakertrans dalam menangani perusahaan yang masih belum berpartisipasi aktif terhadap pelaksanaan Jamsostek.
4. Komisi IX DPR RI meminta PT Jamsostek (Persero) agar pelaksanaan sosialisasi terus dilakukan secara lebih efektif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan di daerah dan Serikat Pekerja sebagai upaya peningkatan kepesertaan peserta Jamsostek.
5. Komisi IX DPR RI meminta PT Jamsostek (Persero) bersama dengan Depnakertrans siap melakukan kajian hukum untuk terkait dengan efektifitas penyelenggaraan perlindungan terhadap TKI, baik di dalam negeri dan di luar negeri.
6. Komisi IX DPR RI mendesak PT Jamsostek (Persero) bersama dengan Depnakertrans membuat kebijakan terkait dengan kepesertaan Jamsostek dengan adanya batasan maksimum upah Rp. 1.000.000.00.
7. Komisi IX DPR RI bersama dengan PT. Jamsostek (Persero) sepakat agar Pemerintah segera menunjuk PT. Jamsostek (Persero) untuk melaksanakan pemberian perlindungan (jaminan) terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri.

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB

Jakarta, 9 Februari 2009
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



HASANUDIN SAID, Ak